



PORTFOLIO REGIONAL COMMUNITY FOUNDATION SULAWESI



A. LATAR BELAKANG

Sulawesi termasuk salah satu wilayah target investasi skala besar karena aset sumberdaya alam yang dimilikinya begitu besar. Investasi-investasi besar baik pertambangan maupun perkebunan telah masuk dan beroperasi pada beberapa wilayah sejak kisaran tahun 1980-an sampai sekarang¹. Dan hal ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya proses-proses konversi lahan yang mengakibatkan cepatnya laju deforestasi di Sulawesi termasuk mengakibatkan konflik penguasaan lahan antara pengusaha pertambangan. Dalam konteks pengembangan lokasi-lokasi model maupun percontohan untuk PSDH lestari Berbasis Masyarakat maka investasi ini dapat sangat mengganggu.

Berbagai prakarsa untuk membangun dan mendorong berbagai inisiatif serta proses-proses pengelolaan sumberdaya (*manusia dan alam*) yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan membutuhkan tidak hanya perhatian berbagai pihak tetapi juga dibutuhkan penyiapan berbagai pra-syarat maupun faktor-faktor pendukung demi terselenggaranya dan tercapainya tata PSDH Lestari Berbasis Masyarakat yang baik. Karena sama kita ketahui bahwa tidak mudah untuk mengkonstruksi atau mendorong lahirnya sebuah kebijakan yang pro dan mendukung PSDH Lestari Berbasis Masyarakat di daerah. Orientasi pemanfaatan sumberdaya hutan yang lebih memberikan keleluasaan kepada pihak swasta ini tidak jarang kemudian berimplikasi pada terjadinya konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan pihak swasta².

Di Sulawesi dalam beberapa tahun terakhir, upaya-upaya memperkuat dan mengembangkan kerjasama antar para pihak dalam mendorong dan memperkuat praktek-praktek PSDHBM untuk terwujudnya **Sustainable Forest Management** pada proses selanjutnya berkembang

¹ Beberapa investasi skala besar di Sulawesi yaitu : (1). PT. INCO di Soroako Sulsel dan Sulteng, (2). PT. Newmont Minahasa Raya di Sulut, (3). PT. Rio Tinto di Blok Lasampala di perbatasan antara Sulteng dan Sultra, (4). PT. Astra Argo Lestari menguasai perkebunan sawit di Sulbar dan Sulteng.

² Sulawesi termasuk wilayah yang tingkat intensitas konfliknya cukup tinggi terkait pengelolaan sumberdaya alam antara masyarakat dengan pihak pemerintah dan swasta. Beberapa contoh misalnya, (1). Konflik berkepanjangan yang dimulai semenjak tahun 1980-an antara masyarakat adat Kajang di Bulukumba dengan PT. Lonsum yang berujung jatuhnya korban pada tahun 2004, (2). Perseteruan sampai dengan saat ini antara masyarakat Teluk Buyat dengan PT. Newmont Minahasa Raya terkait pencemaran Teluk Buyat, (3). Konflik tata ruang akibat proses reclaiming masyarakat empat desa disekitar Taman Nasional Lore Lindu terhadap kawasan dongi-dongi dengan pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu dan dua pemerintahan kabupaten (donggala dan Poso), (4). Konflik wilayah adat antara orang Moronene dengan pihak Balai Taman Nasional Rawa Opa Watumohai yang berakibatnya jatuhnya korban jiwa, (5). Konflik pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-nipa di Sulawesi Tenggara antara masyarakat dan dinas kehutanan.

menjadi sebuah kerjasama regional, nasional dan bahkan level internasional³. Pada proses selanjutnya, berbagai inisiatif kelembagaan multipihak yang telah ada ini harus mulai diintensifkan perannya sebagai salah satu faktor pendukung terselenggaranya tata pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Untuk itu, strategi penguatan dan pengembangan kelembagaan ini kedepan harus betul-betul mempertimbangkan beberapa hal penting yang biasanya mengganggu berjalannya inisiatif ini seperti : (1). Ketidakseimbangan kapasitas dan Kepentingan antar berbagai pihak didalamnya, (2). Lemahnya komitmen baik individu maupun kelembagaan berbagai pihak didalamnya untuk mendukung PSDHBM, (3). Tidak intensifnya proses komunikasi dan sharing informasi maupun pengetahuan antar berbagai pihak dalam kelembagaan ini, (4). Ketidaksiapan infra dan suprastruktur kelembagaan⁴.

Status kelembagaan SCF sebagai grant making dan facilities regional Sulawesi berbentuk Yayasan, pilihan bentuk ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bentuk Yayasan relative dipercaya dalam perspektif Community Foundation masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional. Namun demikian dalam praktiknya SCF mengembangkan mekanisme berbeda terkait dengan keputusan tertinggi organisasi, pada struktur SCF dikenal Forum Dua Tahunan sebagai forum keputusan tertinggi. Hal ini didasarkan pada bahwa inisiatif pendirian dan pengembangan SCF tidak bisa dipisahkan oleh peran Simpul Jaringan PSDA (Pulsa) Celebes sebagai representasi multipihak se Sulawesi, sehingga salah satu kekuatan utama SCF bersumber dari Simpul Jaringan PSDA Multipihak Sulawesi.

Dalam pengelolaan program SCF, sejak tahap perencanaan hingga monitoring evaluasi selalu menempatkan posisi mitra baik yang tergabung dalam Simpul Jaringan Pengelolaan SDA (Pulsa) Celebes maupun mitra program sebagai bagian yang tak terpisahkan. Pada tahap perencanaan terdapat momentum Temu Tahunan (Rapat Tahunan) yang diikuti oleh seluruh komponen struktur SCF dan mitra terpilih, SCF meminta input / kritik dan saran dalam pelaksanaan mandate grantmaking dan facilitiesnya sekaligus menjadi forum untuk melihat trend kebutuhan komunitas Sulawesi dalam Isu Pengelolaan Sumberdaya Alam /Hutan. Demikian pula halnya dalam momentum Rapat Dua Tahunan juga menjadi media / forum

³ Sejak tahun 2003 sampai saat ini, di beberapa provinsi di Sulawesi telah muncul dan bergerak berbagai inisiatif untuk membangun dan mengembangkan Kelembagaan Multipihak untuk mendukung PSDHBM yang lestari dan berkelanjutan seperti : (1). Forum DAS Tondano yang terdiri atas Pemda Sulut, BP-DAS Sulut, Jaringan Masyarakat Antar Kampung dan Universitas Samratulangi Manado, (2). Komisi Daerah Social Forestry Sultra yang beranggotakan Dishut Sultra, Bappeda Sultra, Bapedalda Sultra, LePMIL, JAUH, Koperasi Hutan Jaya Lestari (pada Mei 2005 menjadi satu-satunya di Asia Pasific, organisasi masyarakat yang memperoleh Pengakuan Sertifikasi (SFM) FSC SMARTWOOD dalam pengelolaan hutan milik / Rakyat, sertifikat FSC tersebut diperoleh atas fasilitasi / dukungan multipihak sejak program mfp DFID phase I, Tropical Forest Trust, JICA Dephut dan SCF), Jaringan Masyarakat Pelestari Sumber Daya Alam, (3). Forum Komunikasi Kehutanan Sulawesi Selatan (FKKSS) yang beranggotakan 23 Dinas Kehutanan se-sulsel, KONSTAN, Masyarakat Adat, (4). Forum Kemitraan Taman Nasional Lore Lindu (FKTNLL) yang beranggotakan Balai Taman Nasional Lore Lindu, The Nature Conservancy, CARE dan beberapa NGO di Sulteng dan SCF sendiri sebagai salah satu Exit Strategy dari MFP – DFID

⁴ Infra dan suprastruktur yang dimaksud terkait visi-misi, strategi, program dan target periodik yang akan dikembangkan dan dicapai, ruang lingkup kerja, posisi kelembagaan, sekretariat pelaksana kelembagaan, dan lain-lain.

bagi proses perencanaan program-program SCF. Kebutuhan indikatif program juga telah dapat diidentifikasi pada saat monitoring pelaksanaan program. Pada tahap implementasi / pelaksanaan program SCF melibatkan mitra terpilih (mitra dengan inisiatif /gagasan yang dinyatakan layak untuk mendapat dukungan hibah berdasarkan proses grant) bukan hanya sekedar hubungan antara penerima dana hibah dan penyalur dana hibah, namun SCF mengembangkan hubungan kerjasama program yang lebih dalam sehingga dukungan hibah akan disertai dengan dukungan facilities (peningkatan kapasitas mitra baik melalui asistensi teknis, training, sharelearning maupun networking). Pada tahap monev, SCF bersama mitra terpilih (penerima dukungan hibah) sejak awal program mengembangkan metode pendekatan (instrument dan indicator) Monitoring Evaluasi program yang akan digunakan sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran bersama dan situasi kondusif dalam hubungan kemitraan program.

B. GOAL

Menguatnya Dukungan Berbagai Pihak Dalam Mendorong Akses Dan Peran Serta Masyarakat Dalam PSDH Yang Lestari.

C. TUJUAN

Mendorong Berbagai Inisiatif Perbaikan Penyelenggaraan Tata Kelola Kehutanan melalui **Jaringan Aksi Kebijakan**, Pembelajaran Bersama Antar Para Pihak dan Pengembangan Akses Masyarakat dalam PSDH di Sulawesi

D. HASIL

1. Terjadinya Perubahan dan Perbaikan Kebijakan dalam PSDH lestari berbasis masyarakat di Sulawesi
2. Berkembangnya Model dan Praktek PSDH lestari berbasis masyarakat di Sulawesi
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Usaha Ekonomi Mikro Masyarakat Didalam Dan Sekitar Hutan
4. Menguatnya Jaringan Kerjasama dan Pembelajaran Bersama antar berbagai pihak dan pada berbagai level dalam Mendorong PSDHBM yang Lestari .
5. Menguatnya Peran dan Fungsi SCF sebagai Community Foundation di Sulawesi dalam memberikan layanan program

E. INDIKATOR

1. Lahirnya sejumlah kebijakan yang berpihak dan berkontribusi terhadap jaminan akses dan peran serta masyarakat dalam PSDH lestari.
2. Sejumlah Lokasi PSDH lestari berbasis masyarakat yang secara legal di tetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat menjadi lokasi belajar para pihak
3. Meningkatnya kualitas produksi serta akses pasar bagi produk komunitas
4. Inisiatif kerjasama yang terintegrasi antar berbagai pihak
5. Legitimasi dan Dukungan para pihak kepada SCF meningkat dengan meluasnya cakupan wilayah layanan

F. STARTEGI IMPLEMENTASI PROGRAM

A. Prioritasasi Program Tahun

Pada skala regional, SCF menjadi salah satu organisasi yang didorong untuk memerankan peran strategis sebagai Supporting Initiative dengan pilihan Dua Posisi utama yaitu sebagai Fasilitator dan Grant Making. Dalam menjalankan dua posisi tersebut selama 2 tahun terakhir, SCF telah mendukung 26 inisiatif untuk dukungan hibah kecil, 2 dukungan Planning Grant dan 7 dukungan untuk Hibah Menengah di 5 propinsi di Sulawesi⁵. Untuk 3 tahun kedepan [2008 – 2011], SCF mengembangkan fungsi layanan program berdasar pada prioritas program setiap tahunnya selama tiga tahun kedepan. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahun Pertama :

1. Desiminasi, Sosialisasi dan Studi tentang isu TLAS, VPA dan Tata Usaha Kayu.

Output yang diharapkan 1) Teridentifikasi, terpetakan potensi, respon dan kondisi tata usaha kayu (Kawasan, Kelembagaan, kebijakan) di level kab./propinsi regional Sulawesi, 2) multistakeholder (Pemda, masyarakat tani hutan, perguruan tinggi, CSO/NGO, Private sector kehutanan) regional Sulawesi mengetahui, memahami dan melakukan inisiatif/aktivitas yang berdampak pada penerapan standar legalitas kayu di level daerah / propinsi regional Sulawesi.

2. Pemetaan dan Konsolidasi Output, capaian serta perencanaan program region Sulawesi.

Aktifitas program lebih difokuskan untuk mengkonsolidasi output dan capaian yang telah dihasilkan oleh mitra-mitra melalui dukungan SCF sebelumnya, melalui proses pemetaan inisiatif, Lokus dan Fokus Program yang akan di tindak lanjuti untuk penguatan dan pengembangannya pada tahun kedua. Mendorong proses dan upaya perencanaan yang terintegrasi pada berbagai level yang berbasis pada output/capaian program sebelumnya, kerangka kerja program MFP 2 serta berbasis pada kecenderungan pengelolaan PSDHBM

3. Penguatan, Pengembangan Site CBFM yang telah eksis sebelumnya dan Inisiasi CBFM lestari pada site baru .

Untuk penguatan dan pengembangan CBFM bagi site-site yang telah memiliki cukup modalities (kelembagaan masyarakat, dukungan parapihak, areal kawasan) untuk mendapat legalitas / lisensi berupa ijin pemanfaatan kawasan maupun pemanfaatan hasil hutan kayu / non kayu. Inisiasi di tujukan pada site's potensial baik dari komitmen multistakeholder (khususnya pemda dan komunitas) maupun potensi kawasan hutan.

Tahun Kedua :

Penguatan & Pengembangan Inisiatif

Pada tahun ini strategi dan aktifitas program akan didorong berdasar rekomendasi yang dihasilkan pada tahun pertama program, tetapi juga tidak menutup kemungkinan juga

⁵ Profil dan progress program dua tahun terakhir SCF terlampir

akan merespon inisiatif baru yang memang perlu untuk direspon. Secara umum ruang lingkup implementasi program akan diarahkan pada :

- a. Fasilitasi Penyiapan Lokasi Model [khusus pilot site TLAS & demonstrative activities REDD]
- b. Fasilitasi Penguatan Networking dan Kerjasama
- c. Fasilitasi Advokasi Kebijakan
- d. Promosi PSDHBM
- e. Penguatan Usaha Ekonomi Mikro
- f. Knowledge Management [Informasi dan Komunikasi]
- g. Peningkatan Kapasitas

Tahun Ketiga :

1. Up-Scale dan Perluasan Inisiatif
2. Pendokumentasian dan Promosi

B. Konsolidasi Reguler SCF dan Kemitraan Program

Kegiatan ini merupakan sebuah upaya dan strategi untuk membangun serta menyelaraskan berbagai perkembangan maupun dinamika program, baik pada level internal SCF [Board dan Pelaksana], antara SCF dan mitra pelaksana program, antar mitra-mitra SCF, maupun dengan lainnya. Hal ini penting dilakukan dalam kerangka memaksimalkan pencapaian tujuan dan output program. Disamping itu konsolidasi reguler ini juga diharapkan menjadi media komunikasi lintas pelaku dan kepentingan sekaligus sebagai media pembelajaran bersama.

C. Dukungan Layanan Hibah Grant Making

Salah satu peran strategis SCF adalah memberi dukungan hibah [Grant Making] pada berbagai inisiatif yang berkembang yang bertujuan memajukan PSDHBM di Sulawesi. Dalam menjalankan peran ini, SCF memiliki 4 [empat] skema dukungan dana hibah :

1. Dana Hibah Menengah : Rp. 40.000.000 s/d Rp. 200.000.000
2. Dana Hibah Kecil : Maksimal Rp. 40.000.000
3. Dana CB/Travel Grant : Maksimal Rp. 5.000.000
4. Dana Emergency Respond : Berdasar Kebutuhan

Dalam proses pemberian dukungan pendanaan, SCF telah memiliki mekanisme yang menjamin terjadinya proses objektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme grantmaking SCF saat ini melalui proses seleksi terbuka dengan mengundang inisiatif/gagasan dari mitra komunitas Sulawesi [Call Proposal/Project Definition] dan diputuskan melalui Sidang PAC [Proposal Appraisal Committee]. Sidang PAC sendiri beranggotakan : Direktur Eksekutif dan Program Manager SCF, Penilai Independen/ Eksternal [Akademisi, Aktivistis NGO, serta Praktisi yang memiliki kompetensi yang relevan dengan isu proposal yang akan dinilai.

D. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas

Untuk mencapai tujuan dan output program sekaligus mengawal dan memelihara proses-proses kemultiphikan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan, kegiatan peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan para pihak menjadi salah satu syarat penting. Sehingga pilihan bentuk kegiatan seperti lokakarya, training, Teknikal Asisten yang berbasis pada dinamika dan kebutuhan pada lokasi-lokasi pengembangan program. Partisipatif, Transformatif dan Egaliter adalah metode dan teknik yang akan dikembangkan dalam kegiatan capacity building ini, sehingga kedepannya diharapkan dapat menghasilkan sumberdaya baik kelembagaan maupun orang yang lebih inovatif dan berkualitas.

E. Pengelolaan dan Pengembangan Pengetahuan

Pengelolaan pengetahuan menjadi salah satu strategi untuk mendorong terjadinya up streaming program diberbagai level, pengelolaan dan pertukaran pengetahuan secara teknis di jalankan oleh Unit layanan informasi yang diinisiasi mitra. Namun produksi pengetahuan dilakukan secara paralel / bersama antara SCF dan mitra-mitranya (terkait dengan implementasi program yang tengah didukung maupun pengetahuan lainnya), SCF sendiri juga hendak memfasilitasi Riset dan kajian untuk menciptakan pengetahuan, (konklusi, argumentasi ilmiah didasarkan pada fakta-fakta empiris) terkait dengan 4 (empat) Isu prioritas program SCF ; Pembaharuan Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan, Antisipasi Perubahan Iklim dan Penguatan Usaha mikro kecil menengah dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Demikian pula halnya riset & kajian terkait dengan dampak program akan sangat membantu penyempurnaan strategi pendekatan program di periode mendatang. Dokumen hasil riset dan kajian nantinya menjadi referensi bagi SCF dan multistakeholder kehutanan Sulawesi.

F. Monitoring dan Evaluasi Secara Partisipatif dan Berkala

Rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi secara partisipatif dan berkala merupakan salah satu alat/cara yang ditujukan untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan output program konsisten dengan perencanaan yang disepakati sebelumnya. Disamping itu, kegiatan monev ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi serta merespon secara cepat berbagai kendala maupun perubahan skenario program yang dibutuhkan berkaitan perkembangan dinamika program.

G. Transparansi dan Akuntabilitas Program

Untuk mendorong legitimasi dan kepercayaan para pihak atas kelembagaan SCF dan mitranya dalam penyelenggaraan program serta sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan program, maka akan dilakukan :

1. Public Expose secara berkala terkait perkembangan dan pencapaian program
2. Menunjuk Auditor Independen untuk memeriksa penyelenggaraan keuangan program baik yang dilakukan oleh SCF maupun Mitra Pelaksana

G. JADWAL DAN WILAYAH IMPLEMENTASI PROGRAM

Program ini akan dilaksanakan selama 3 tahun terhitung Oktober 2008 s/d Februari 2011 dengan wilayah layanan program berada di enam propinsi yang ada di Sulawesi, dimana pada setiap propinsi akan di implementasikan oleh mitra-mitra SCF

H. MITRA KERJASAMA

Mitra Pelaksana pada program ini direncanakan :

1. Nasional
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 - b. Departemen Kehutanan Indonesia
 - c. Yayasan KEHATI : Service Provider MFP 2
 - d. Partnership For Governance Reform Indonesia
 - e. CSO Network On Forestry Governance and Climate Change
 - f. Aliansi Jurnalis Independen

2. Regional
 - a. Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi [BKPRS]
 - b. APKASI & APEKSI
 - c. KLH Sumapapua
 - d. BPKH
 - e. RECOFTC
 - f. PULSA CELEBES

3. Daerah
 - a. Pemerintah Daerah [Provinsi, Kabupaten/Kota]
 - b. UPT dan UPTD Kehutanan
 - c. CBOs dan NGOs
 - d. Perguruan Tinggi
 - e. Jaringan Media

I. CAKUPAN PENERIMA MANFAAT

1. Masyarakat Didalam Dan Sekitar Hutan
2. Pemerintah Daerah [Provinsi, Kabupaten/Kota]
3. Forum dan Kelembagaan Multipihak
4. Perguruan Tinggi
5. Kelembagaan Masyarakat
6. Lembaga Swadaya Masyarakat

J. RENCANA BIAYA

Secara total rencana biaya untuk implementasi program ini adalah : Rp

K. LAMPIRAN

1. Profil Organisasi
2. Workplan & Indicative Budge
3. Surat Opini Auditor

I. ORGANISASI PENGUSUL

A. INFORMASI UMUM ORGANISASI

Nama Organisasi : Sulawesi Community Foundation
Singkatan Org. : S.C.F
Tahun Dibentuk : 05 JUNI 2006
Wilayah Kerja : Regional Sulawesi
Alamat Kantor : Lt. 2 dGreen Learning Center Café
Jl. Sungai Saddang Baru No. 46 Makassar
Sulsel-Indonesia
Telp/Fax. : +62411-449563
Website : www.sulawesifoundation.org
Alamat Email : admin@sulawesifoundation.org,
sulawesifoundation@yahoo.com
Akta Notaris : No. 04/14 Juni 2006, Notaris Hermaningsih Andi Hakim, SH, MKn
Ket. Domisili : 07/KBP/I/2007
NPWP : 02.642.925.8-805.000

B. INFORMASI BANK

Bank : BNI 46 Capem UNM Makassar
Nomor Rekening : 124117645
Nama Rekening : Yayasan Sulawesi Community Foundation
SWIFT Code : BNINIDJA

C. STRUKTUR PELAKSANA ORGANISASI

1. BOARD

Ketua : Anas Nikoyan
Anggota : Nonette Royo
Anggota : Chandra Kirana
Anggota : Abdi Suryanengati
Anggota : Burhanuddin Buna

2. PENGAWAS

Ketua : Jeffri Polii
Annggota : Sri Endang Sukarsih
Anggota : Maher Takaka

3. PELAKSANA HARIAN

Direktur Eksekutif : Muhamad Rifai
Manager Program : Rustanto S.
Manager OD/HRD : Bachrianto Bachtiar
Manager Keuangan : Suryana
Grant Administrator : Intan Baiduri

Program Officer : Anton Sanjaya
Program Officer : Arham
Sek. Dan Dokumentasi : Andi Rezky Puspita Ayu
Supporting Staff : Syahrudin

D.PROGRAM KERJASAMA [*History Preview*]

1. DFID – UK

Program : Multistakeholder Forestry Program
Tahun : September 2006 s/d April 2008
Status Program : Telah selesai dan juga telah di audit oleh Akuntan Publik
Hasil Audit : Terlampir
Anggaran : Rp. 2.352.271.000,-

2. PARTNERSIP FOR GOVERNANCE REFORM INDONESIA

a. Program : Forest Governance Program
Tahun : Oktober 2007 s/d September 2009
Status : On Going
Anggaran : Rp. 1.869.461.000,-

b. Program : Urban Forestry
Tahun : Juli 2008 s/d Juni 2009
Status : On Going
Anggaran : Rp. 870.018.000,-

3. CARITAS – LATIN [*Sedang Dalam Proses Inisiasi*]

Program : Restoration Of The Area Around Lake Tondano
Tahun : Oktober 2008 s/d November 2010
Status : Sedang dalam proses inisiasi dan negosiasi
Renc. Anggaran : Rp. 3.416.000.000 [*Negotiated*]